

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar belakang**

Hubungan Internasional adalah sebuah disiplin ilmu yang mempelajari interaksi dan hubungan antar aktor-aktor yang mengambil panggung internasional yang mencakup satu atau lebih negara. Dalam studi hubungan internasional, sebuah negara tidak akan dapat bertahan hanya sendirian. Menjalin hubungan dengan pihak luar adalah hal yang krusial dan tidak bisa diganggu gugat. Negara dengan negara maupun negara dengan organisasi internasional, tidak jarang juga negara melakukan hubungan dengan sebuah perusahaan, mau itu secara bilateral, multilateral ataupun regional tergantung kepentingan yang ingin dipenuhi. Demi menjaga dan mempertahankan keberlangsungan hidup sebuah negara, negara tidak dapat menutupi kekurangan yang mereka miliki sendirian. (Jackson & Sorensen, 2005) Setiap negara memiliki kekurangan dan keterbatasan yang hanya dapat diatasi dengan menjalin kerja sama dan hubungan baik dengan negara, organisasi internasional, maupun individu non-negara seperti perusahaan multinasional.

Melalui hubungan internasional, sebuah negara dapat menutupi kekurangan, memenuhi kebutuhan dan kepentingan nasionalnya, seperti keamanan, ekonomi, sosial-budaya, dan lain sebagainya. Selain itu, dengan hubungan internasional memungkinkan negara-negara berpartisipasi dalam menangani isu-isu

global, seperti perdamaian, perlindungan HAM, dan perubahan iklim yang pasti akan berimbas buruk untuk negara mereka sendiri. Dengan demikian, studi hubungan internasional menjadi sangat penting untuk mempelajari dan memahami serta memprediksi dinamika interaksi antar aktor di panggung internasional serta bagaimana keterlibatan mereka bagi keberlangsungan hidup suatu negara

Indonesia, sebagai negara berkembang yang memiliki posisi strategis di kawasan Asia Tenggara, berkomitmen kuat untuk menjaga dan memperkuat hubungan dengan berbagai negara di seluruh dunia. Komitmen ini tidak hanya didasarkan pada kepentingan politik dan ekonomi, tetapi juga pada upaya untuk menjaga stabilitas regional dan internasional serta memperkuat posisi Indonesia di kancah global. Melalui partisipasi aktif dalam berbagai forum internasional, seperti ASEAN, PBB, G20, dan berbagai organisasi multilateral lainnya, Indonesia terus berupaya memainkan peran penting dalam mendukung perdamaian, keamanan, dan pembangunan berkelanjutan (*Kerja Sama Bilateral*, n.d.). Selain itu, Indonesia juga berusaha memajukan kepentingan nasionalnya melalui diplomasi yang proaktif dan inklusif, yang melibatkan berbagai aspek seperti diplomasi ekonomi, lingkungan, keamanan, dan budaya. Dalam konteks ini, Indonesia secara konsisten mendorong kerjasama yang saling menguntungkan dengan negara-negara lain, baik di tingkat bilateral maupun multilateral. Dengan demikian, Indonesia tidak hanya memperkuat hubungan diplomatiknya, tetapi juga memastikan bahwa kepentingan nasional, termasuk dalam hal pertumbuhan ekonomi, pembangunan sosial, dan perlindungan kedaulatan, tetap menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan luar negerinya.

Indonesia dan Vanuatu telah menjalin hubungan bilateral sejak tahun 1980, dan Indonesia dan Vanuatu menjalin kontak informal selama 15 tahun. Hubungan tersebut ditandai dengan kerja sama di berbagai bidang, termasuk pembangunan, ekonomi, dan bantuan bencana. Pada tahun 1995 merupakan awal mula diplomatik kedua negara, Indonesia dan Vanuatu menandatangani komunike bersama yang mendukung kebijakan luar negeri Indonesia selama pemisahan Timor Timur dari Indonesia, yang mana Vanuatu mendukung Indonesia atas Timor Timur. Komunike ini menandakan awal kerjasama diplomatik antara kedua negara meskipun terdapat perbedaan pandangan yang signifikan mengenai isu kedaulatan dan hak asasi manusia. Dalam konteks ini, Vanuatu memberikan dukungan kepada posisi Indonesia di ranah internasional terkait Timor Timur, membantu Indonesia dalam mempertahankan posisi mereka di berbagai pertemuan internasional dan melawan tekanan dari berbagai sudut pandang yang mendukung kemerdekaan Timor Timur, meskipun kemudian hubungan kedua negara berkembang secara dinamis, terutama setelah Timor Timur meraih kemerdekaan. Pada tahun 2015, Vanuatu dilanda Topan Pam, dan Indonesia memberikan bantuan, sehingga semakin memperkuat hubungan bilateral. Kedua negara juga telah berkolaborasi dalam organisasi regional seperti *Melanesian Spearhead Group* (MSG), namun sekarang menjadi platform bagi Vanuatu untuk mengadvokasi kemerdekaan Papua. (Isnaeni, 2020)

Vanuatu memprovokasi Indonesia dengan mengkritik Indonesia di kancah internasional, khususnya di Pertemuan Majelis Umum PBB, terkait dugaan pelanggaran HAM di Papua. Vanuatu sendiri merupakan anggota dari PBB dan juga

merupakan sebuah negara Melanesia yang berada di kepulauan Pasifik, Vanuatu sebagai negara Melanesia memiliki pandangan bahwa Papua bukan seharusnya menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia melainkan seharusnya menjadi negara yang independen yang merupakan bagian dari kepulauan Pasifik, bersama dengan saudara-saudara Melanesia mereka. (Temaluru, 2016) Sebagai perwakilan dari *Melanesian Spearhead Group* (MSG) Vanuatu secara aktif dalam setiap kesempatan di Sidang Umum PBB menyuatkan agar PBB melakukan penyelidikan terhadap Indonesia dan itu cukup mengganggu pihak Indonesia, dikarenakan itu Indonesia merasa dipermalukan dimata internasional. Vanuatu menggunakan beberapa tragedi kemanusiaan yang terjadi di Papua beberapa tahun ke belakang sebagai senjata yang membuat kemampuan Indonesia menjaga Papua dipertanyakan.

Isu Papua dan hak asasi manusia telah menjadi sumber gesekan utama dalam hubungan bilateral Indonesia-Vanuatu. Vanuatu tidak hanya baru secara terbuka mengkritik Indonesia di forum internasional seperti Sidang Umum PBB terkait dugaan pelanggaran HAM di Papua, namun Vanuatu memiliki berapa catatan yang mana Vanuatu mengangkat isu yang sama, diantaranya:

Pada tahun 2016, Vanuatu menggunakan kesempatan berpidato di depan Majelis PBB dan mengkritik catatan HAM Indonesia di Papua, delegasi Indonesia saat itu yang diwakili oleh diplomat Nara Masista Rakhmatia, menanggapi kritikan itu dengan respon tegas dan berkata bahwa laporan bermotif politik yang Vanuatu angkat, dirancang untuk mendukung kelompok-kelompok separatis di provinsi Papua Barat, yang telah secara konsisten terlibat dalam menghasut kekacauan

publik dan dalam melakukan serangan teroris bersenjata, pada gilirannya berbicara. Selanjutnya pada tahun 2017, kali ini Vanuatu kembali bersuara dan langsung dibantah dengan suara lantang dan tegas Ainan Nuran dengan berkata ‘satu kali sudah terlalu banyak untuk *hoax* dan dugaan keliru’.

Pada 2018, Indonesia yang diwakilkan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla mengangkat pernyataan yang menyindir Vanuatu yang dianggap mendukung gerakan separatisme. Pada 2019, Vanuatu meminta PBB untuk mengunjungi Papua dan menyelidiki situasi di sana, perwakilan Indonesia Rayyanul Sangatdji menggunakan hak jawabnya dengan menuding bahwa motif Vanuatu bukanlah kepedulian pada HAM melainkan karena dukungan Vanuatu terhadap separatisme Papua. Pada 2020, Perdana Menteri Vanuatu Bob Loughman kembali menyerukan agar Indonesia mengizinkan kunjungan Komisaris Tinggi HAM PBB ke Papua. Indonesia yang diwakili oleh Silvany Austin Pasaribu dengan tegas mengingatkan bahwa Vanuatu bukanlah representasi rakyat Papua. Silvany Pasaribu bahkan menyerang balik Vanuatu dengan nada keras di Sidang Umum PBB. Pada tahun 2021, Bob Laughman masih mempertanyakan pelanggaran HAM di Papua, Sindy Nur Fitry sebagai perwakilan Indonesia dan mengatakan bahwa tuduhan Vanuatu mengusik kedaulatan negara lain dengan tuduhan yang tidak mendasar dan mengatakan bahwa Vanuatu menutup mata dan tidak peduli terhadap tindakan teror yang Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang terjadi di Papua. (Yanwardhana, n.d.)

Pada 2023, Indonesia yang diwakili oleh Wakil Menteri Luar Negeri, Pahala Mansury melakukan aksi *Walk Out* dari forum Konferensi Tingkat Tinggi

Pimpinan Negara Melanesia (KTT MSG) ke-22 di Vanuatu, saat Benny Wenda yang merupakan tokoh penting Papua Merdeka, melakukan pidato yang hendak membahas tentang Papua. Vanuatu merupakan tokoh penting yang memasukan Benny Wenda ke dalam forum KTT MSG dan terang-terangan mendukung kampanye kemerdekaan Papua yang dilakukan Benny Wenda (CNN Indonesia, 2023).

Diplomasi Indonesia ditantang untuk mengatasi ketegangan ini sembari tetap menjaga prinsip tidak campur tangan dalam urusan dalam negeri dan menjaga keutuhan wilayah NKRI sesuai prinsip kedaulatan negara. Menanggapi tindakan Vanuatu di forum PBB, pemerintah Indonesia melakukan beberapa kerja sama ekonomi, teknologi, pelatihan, beasiswa, dan pembangunan dan lainnya, dengan maksud meredakan dan mengubah pikiran Vanuatu dalam mendukung kemerdekaan Papua. Pada 2018 silam, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, Dan Keamanan mengajukan anggaran tambahan sebesar Rp. 60M yang dimaksud untuk meningkatkan koordinasi kerja sama Indonesia dengan negara-negara kawasan Pasifik Selatan. Anggaran sebesar itu dipecahkan menjadi Rp. 20M untuk meningkatkan citra Papua, Rp. 15M untuk meningkatkan kerja sama Indonesia dengan Pasifik Selatan, Rp. 15M meningkatkan kerja sama Indonesia dengan Organisasi Internasional Pasifik Selatan, Rp 5 miliar dipergunakan untuk pengelolaan keamanan wilayah perbatasan Australia dan Pasifik Selatan, dan Rp 5 miliar dipergunakan untuk peningkatan kerja sama intelijen keamanan wilayah perbatasan Australia dan Pasifik Selatan (*Dpr.go.id, 2023*).

Menko Polkam Wiranto mengatakan bahwa 3 sampai 5 tahun yang lalu setengah dari negara di Pasifik Selatan mendukung kemerdekaan Papua, sementara kebanyakan negara-negara itu menerima informasi yang keliru mengenai sikap Indonesia terhadap Papua. Salah satunya adalah anggapan bahwa Indonesia “menganaktirikan” pembangunan Papua yang membuat kemajuan Papua menjadi terbelakang (*Polkam.go.id, 2018*). Terbaru adalah pertemuan tingkat tinggi bersama dengan menteri luar negeri perwakilan Vanuatu pada tahun 2023. Dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak berjanji untuk memperkuat kerja sama bilateral dalam bidang perdagangan dan pengembangan, serta meningkatkan kerja sama dalam meningkatkan kesadaran dan kepedulian terhadap isu Papua di wilayah Pasifik (*Dpr.go.id, 2023*).

Isu Papua pada dasarnya bukan hanya menerima serangan dari pihak luar, namun ada beberapa aspek yang dapat mendukung terjadinya konflik di Papua yang selanjutnya menjadi isu yang memang harus diselesaikan oleh pihak Indonesia, namun tidak seharusnya Vanuatu mengintervensi. Laporan Amnesty International tahun 2023 tentang Indonesia mengungkap berbagai pelanggaran hak asasi manusia yang signifikan di negara tersebut, terutama di Papua Barat. Laporan ini menjelaskan kejadian-kejadian seperti penangkapan demonstran damai, penggunaan kekuatan berlebihan dalam membubarkan protes, pembunuhan di luar hukum, serta penyiksaan oleh militer di Papua. Selain itu, terdapat pemenjaraan aktivis pro-kemerdekaan, penyiksaan dan penganiayaan sistematis oleh aparat keamanan, dan kurangnya konsultasi dengan populasi yang terdampak oleh proyek-proyek pembangunan.

Laporan tersebut juga mengkritik ketergantungan Indonesia pada batu bara untuk energi, serta kurangnya rencana yang memadai untuk mengurangi penggunaan bahan bakar fosil. Dan juga mencerminkan ketegangan di Papua, termasuk insiden penyanderaan seorang pilot dan operasi militer yang menyusulnya. Laporan ini turut menyebutkan pelanggaran kebebasan berkumpul dan berekspresi, pembunuhan di luar hukum oleh pasukan keamanan, penyiksaan terhadap tahanan, pelanggaran oleh kelompok bersenjata, serta kegagalan dalam menjamin hak ekonomi, sosial, dan budaya. Secara keseluruhan, laporan ini menyoroti berbagai tantangan hak asasi manusia yang dialami oleh masyarakat di Papua Barat dan Indonesia secara umum (*Amnesty.org*, 2023).

Vanuatu telah melanggar perjanjian non-intervensi piagam PBB yang seharusnya mereka hormati sebagai anggota organisasi tersebut. Pada akhirnya Indonesia menuding bahwa Vanuatu memiliki maksud tidak sehat dibalik semua kritik terhadap HAM di Papua (*Dpr.go.id*, 2018). Piagam PBB menekankan pentingnya kedaulatan negara dan non-intervensi dalam urusan dalam negeri negara lain, sebuah landasan fundamental dalam hubungan internasional (tercantum pada pasal 2, *point* 1 dan 7) (*Charter, U.N*, 1945). Namun, tindakan Vanuatu yang terus-menerus mengangkat isu Papua di berbagai forum internasional dianggap oleh Indonesia sebagai bentuk campur tangan yang tidak sepatutnya dalam urusan dalam negeri Indonesia.

Menurut Neles Tebay, seorang Pastor dan juga koordinator Jaringan Damai Papua, dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Papua merupakan topik yang hangat dibicarakan di negara-negara Pasifik. Isu ini tidak hanya

diperbincangkan di kalangan elit politik, tetapi juga menjadi bahan diskusi di masyarakat umum.

“Karena mereka menganggap masalah yang terjadi di Papua adalah permasalahan keluarga besar Melanesia. Elite politik di negara-negara Pasifik bisa berbeda pendapat soal banyak hal, tetapi mereka satu suara tentang pelanggaran HAM di Papua. Bahkan permasalahan yang terjadi di Papua ini tidak hanya dibahas di kalangan elit saja, tetapi juga mengakar sampai menjadi isu-isu masyarakat di kampung-kampung.” (*Problem DiplomatiK Dan Pelanggaran HAM Di Papua*, 2016)

Jelasnya dalam wawancara dengan hukumonline.com. Jaringan Damai Papua merupakan lembaga yang menjadi Fasilitator antara pemerintah, kelompok bersenjata non-negara dan kelompok Masyarakat Sipil untuk mengurangi konflik, membatasi jatuhnya korban dan penderitaan Orang Papua yang disebabkan oleh konflik bersenjata dan mengembangkan peluang untuk penyelesaian perdamaian di Tanah Papua. (*Jaringan Damai Papua*, n.d.)

Sementara itu, artikel dari dailypost.vu, Daily Post Vanuatu, menjelaskan alasan dukungan kuat Vanuatu terhadap kemerdekaan Papua Barat. Vanuatu mendasarkan posisinya pada prinsip-prinsip inti tentang hak penentuan nasib sendiri dan ketidakberpihakan. Sejak kemerdekaan, Vanuatu telah konsisten mendukung usaha dekolonisasi di berbagai belahan dunia melalui forum multilateral seperti PBB. Dukungan Vanuatu terhadap dekolonisasi tidak terbatas pada Papua Barat saja; mereka juga mendukung kemerdekaan Kaledonia Baru,

Palestina, dan terlibat dalam pembentukan *Melanesian Spearhead Group (MSG)* sebagai kendaraan untuk mendukung dekolonisasi di Melanesia dan denuklirisasi di Pasifik.(Kaiku, 2019) Dalam artikel ini menunjukkan bagaimana Vanuatu menggunakan pengalaman historis mereka sendiri dengan penjajahan sebagai dasar moral untuk mendukung hak-hak menentukan nasib sendiri di Papua Barat dan daerah-daerah lain yang masih mengalami kekuasaan kolonial. Pengalaman Vanuatu sebagai negara yang pernah dijajah oleh dua kekuatan kolonial, Inggris dan Prancis, memberikan mereka perspektif unik tentang penderitaan dan perjuangan bangsa-bangsa yang masih terjajah. Inilah yang mendorong Vanuatu untuk berkomitmen pada prinsip-prinsip dekolonisasi dan untuk membela hak-hak bangsa lain yang masih berada di bawah dominasi kekuatan asing.

Dalam konteks ini, dukungan Vanuatu terhadap kemerdekaan Papua Barat bukan hanya sekadar sikap politik, tetapi juga cerminan dari komitmen mereka terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan global. Mereka melihat isu Papua Barat sebagai bagian dari perjuangan global untuk mengakhiri kolonialisme dan menegakkan hak-hak dasar manusia, termasuk hak untuk menentukan nasib sendiri. Dukungan ini juga mencerminkan keyakinan Vanuatu bahwa setiap bangsa memiliki hak untuk hidup merdeka dan menentukan masa depannya tanpa campur tangan atau dominasi dari kekuatan eksternal.

Melalui tindakan dan dukungan ini, Vanuatu berupaya membangun solidaritas di antara negara-negara yang berbagi pengalaman serupa dalam hal penjajahan dan perjuangan untuk kemerdekaan. Mereka berharap bahwa dengan mendukung hak-hak bangsa lain untuk menentukan nasib sendiri, dunia akan lebih

mendekati keadaan di mana semua bangsa dapat hidup bebas, merdeka, dan berdaulat, seperti yang mereka capai setelah perjuangan panjang melawan kolonialisme.

Dalam penelitian ini, peneliti akan mengambil empat penelitian terdahulu yang dianggap relevan dan dapat menjadi acuan utama. Penelitian-penelitian ini akan sangat bermanfaat sebagai rujukan ilmiah yang kuat dan mendalam bagi pengembangan penelitian ini. Keempat penelitian tersebut dipilih berdasarkan kontribusi mereka terhadap pemahaman topik yang sedang diteliti, metodologi yang digunakan, serta relevansi hasil-hasil yang mereka temukan terhadap konteks penelitian yang sedang dilakukan. Keempat penelitian itu adalah sebagai berikut:

Yang pertama adalah penelitian oleh Kristin Natalia pada tahun 2021 dengan judul '*Analisa Diplomasi Indonesia Terhadap Vanuatu terkait Isu Papua Merdeka*' dalam tulisan ini sang peneliti hanya berusaha menjelaskan diplomasi yang dilakukan oleh Indonesia terkait intervensi yang dilakukan oleh Vanuatu terhadap tuntutan Papua untuk merdeka. (Natalia, 2021) Sedangkan penelitian ini akan melihat lebih kepada usaha Indonesia mengatasi ketegangan dalam hubungan kedua negara.

Yang kedua merupakan penelitian oleh Muhamad Tezar Bilyam pada tahun 2021 yang berjudul '*Diplomasi Publik Indonesia Ke Vanuatu Dalam Penurunan Tendensi Separatisme Di Papua*' dalam penelitian ini sang peneliti membahas tentang tindakan Indonesia yang melakukan diplomasi publik kepada Vanuatu untuk mendorong/menekan dan menurunkan berkembangnya niatan

separatisme di Papua. (Bilyam, 2021) Sedangkan penelitian ini akan melihat dari sudut pandang Indonesia yang ingin meredakan ketegangan antar kedua negara.

Yang ketiga diteliti oleh Yesica Putri Prisilia Angeli Adi pada tahun 2022 yang berjudul '*Hubungan Diplomatik Indonesia Dan Vanuatu Terkait Dengan Pernyataan Vanuatu Mendukung Organisasi Papua Merdeka (OPM)*' yang membahas hubungan bilateral antar kedua belah pihak saat Vanuatu terang-terangan mendukung pisahnya Papua dari Indonesia. (Adi, 2022) Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada fokus penelitian yang mana penelitian ini akan melihat bagaimana strategi diplomasi yang dilakukan Indonesia.

Yang keempat merupakan penelitian dari Frans Kenny Chandra pada tahun 2022 yang berjudul '*Analisis Konflik HAM Yang Terjadi Di Papua*' Penelitian ini berfokus kepada isu HAM di tanah Papua (Chandra et al., 2022), sedangkan dalam penelitian ini HAM menjadi akar dari permasalahan kedua negara.

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil beberapa mata kuliah yang telah peneliti pelajari yang dapat diafiliasikan terhadap judul penelitian. Mata kuliah yang pertama adalah Diplomasi dan Negosiasi. Dalam mata kuliah ini membantu peneliti dalam mendalami serta memahami diplomasi sebagai praktik yang mempengaruhi perilaku aktor negara lain melalui dialog mulai menjadi alat yang sering digunakan negara guna menjalin hubungan kerja sama maupun untuk memperkuat kekuatan nasional. Mata kuliah terkait selanjutnya adalah Politik Luar Negeri. Dengan mata kuliah ini, peneliti dapat mendalami analisis dengan menggunakan mata kuliah Politik Luar Negeri. Mata kuliah yang terakhir adalah

Pengantar Hubungan Internasional. Mata kuliah ini dapat menjadi pedoman dasar peneliti dalam menentukan arah penelitian dalam konteks studi Hubungan Internasional.

Maka berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, muncullah ketertarikan peneliti untuk melakukan penelitian yang selanjutnya akan dituangkan dalam usulan penelitian yang berjudul: **“Strategi Diplomasi Indonesia Dalam Mengatasi Ketegangan Hubungan Bilateral Dengan Vanuatu Atas Indikasi Pelanggaran HAM Di Papua”**. Yang akan menjelaskan bagaimana strategi Indonesia dalam mengatasi ketegangan hubungan bilateral dengan Vanuatu yang dipicu oleh dugaan pelanggaran HAM di Papua yang disuarakan oleh Vanuatu melalui pertemuan majelis umum PBB.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah adalah elemen kunci dalam sebuah penelitian yang berfungsi untuk mengarahkan dan memfokuskan seluruh proses penelitian. Ini berupa pernyataan atau pertanyaan yang mengidentifikasi isu utama yang akan diteliti, membantu peneliti dalam memilih metode penelitian yang tepat, serta memastikan bahwa penelitian tetap relevan dan terarah. Dengan rumusan masalah yang jelas dan spesifik, peneliti dapat mengumpulkan dan menganalisis data secara efektif, serta menghasilkan temuan yang bermakna.

Rumusan masalah juga memainkan peran penting dalam menentukan batasan dan ruang lingkup penelitian, sehingga penelitian tidak melebar ke topik

yang tidak relevan. Dengan demikian, rumusan masalah menjadi panduan yang krusial untuk mencapai tujuan penelitian dan memberikan kontribusi yang signifikan, baik dari segi pengembangan teori maupun aplikasi praktis.

### **1.2.1. Rumusan Masalah Makro**

Atas latar belakang yang telah terpapar di atas, rumusan masalah yang penulis temukan adalah: **Bagaimana Strategi Diplomasi Indonesia Dalam Mengatasi Ketegangan Hubungan Bilateral Dengan Vanuatu Atas Indikasi Pelanggaran HAM Di Papua?**

### **1.2.2. Rumusan Masalah Mikro**

1. Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan Indonesia untuk mengatasi ketegangan hubungan bilateral dengan Vanuatu?
2. Bagaimana kendala yang dihadapi Indonesia dalam proses mengatasi ketegangan hubungan bilateral dengan Vanuatu terkait isu Papua?
3. Bagaimana dampak dari strategi diplomasi Indonesia terhadap hubungan bilateralnya dengan Vanuatu?

### **1.3. Batasan Masalah**

Pembatasan masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran masalah pokok masalah agar penelitian tersebut lebih terarah dan mempermudah dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan tercapai. Dalam penelitian ini, pembatasan masalah akan dibatasi dari tahun 2019 hingga 2024.

Dikarenakan dalam jangka waktu 2019 hingga 2021 di mana Vanuatu selalu menuntut PBB untuk memeriksa keadaan di Papua dengan mengangkat isu HAM di Papua, sedangkan 2022 hingga 2024 Vanuatu tidak lagi mengangkat isu HAM Vanuatu di forum PBB.

#### **1.4. Maksud & Tujuan Penelitian**

##### **1.5.1 Maksud Penelitian**

Maksud dari penelitian ini adalah untuk memenuhi tugas akhir skripsi. Sembari memberikan informasi dan pengetahuan terbaru yang sudah dibaharui serta membentuk bahan acuan bagi penelitian selanjutnya.

##### **1.5.2 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah, maka dapat ditentukan bahwa penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh Indonesia untuk mengatasi ketegangan hubungan dengan Vanuatu.
2. Mengidentifikasi kendala yang dihadapi Indonesia dalam proses mengatasi ketegangan hubungan bilateral dengan Vanuatu terkait isu Papua.
3. Menganalisis dampak dari strategi diplomasi Indonesia dalam hubungan bilateral Indonesia dan Vanuatu.

## **1.5. Kegunaan Penelitian**

### **1.5.1 Kegunaan Teoritis**

Penelitian ini dapat digunakan untuk memberikan contoh konflik bilateral Indonesia dan Vanuatu termasuk Isu HAM Papua yang menjadi sumber gesekan dalam hubungan kedua negara, juga akan sangat berguna dalam menjelaskan strategi diplomasi Indonesia dalam mengatasi konflik antar negara, dan pada akhirnya penelitian ini akan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan hubungan Indonesia dengan Vanuatu, baik peningkatan kerja sama bilateral dan pengembangan relasi.

### **1.5.2 Kegunaan Praktis**

#### **1. Bagi Peneliti**

Penelitian ini berguna sebagai syarat untuk meraih gelar strata satu di Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Komputer Indonesia. Selain itu juga penelitian ini juga sangat berguna sebagai buah hasil karya ilmiah bagi peneliti. Dan juga sebagai bahan memperluas pengetahuan peneliti akan diplomasi.

#### **2. Bagi Program Studi**

Diharapkan penelitian ini mampu menjadi bahan referensi dan bahan perbandingan bagi mahasiswa/i yang

ingin mengembangkan penelitian maupun pengetahuan dibidang yang sama dimasa yang akan datang.

### 3. Bagi Universitas Komputer Indonesia

Hasil penelitian dapat diharapkan menjadi bahan pustaka bagi mahasiswa/i Universitas Komputer Indonesia terkhususnya bagi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dalam tingkatan strata satu.